**MAKALAH**

**Revolusi Prancis**

****

**Disusun Oleh :**

**Kelompok Prancis**

**SMKN 1 Banyuwangi**

**BAB I**

**Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang**

Revolusi Prancis (1789-1799) adalah peristiwa penting yang mengubah tatanan politik, sosial, dan ekonomi di Prancis. Masyarakat Prancis saat itu terbagi dalam tiga golongan utama (*estate*): bangsawan, pendeta, dan rakyat biasa. Ketidakadilan sosial yang mencolok, ditambah krisis ekonomi akibat perang, gaya hidup mewah keluarga kerajaan, serta kegagalan panen, memicu ketegangan. Selain itu, ide-ide Pencerahan dari tokoh seperti Voltaire dan Rousseau mendorong rakyat untuk menuntut perubahan.

Peristiwa pengambilan Bastille pada 14 Juli 1789 menjadi simbol awal revolusi. Selama prosesnya, terjadi perubahan besar seperti penghapusan feodalisme, pengadopsian *Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara*, dan pembentukan Republik Prancis pertama. Revolusi ini menjadi tonggak penyebaran nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan demokrasi yang memengaruhi dunia.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, proses, dan dampak Revolusi Prancis untuk Indonesia, serta mengambil pelajaran berharga dari peristiwa tersebut dalam konteks sejarah dan perkembangan sosial-politik modern.

**BAB II**

**Pembahasan**

**2.1 Pengertian Demokrasi Terpimpin**

Revolusi Prancis (Bahasa Prancis: *Révolution française*; 1789–1799), adalah suatu periode pergolakan politik dan sosial radikal di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu tiga tahun. Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik; feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyarakat petani di perdesaan.

**2.2Pemikiran yang melandasi revolusi**

Sejak abad ke-13, raja-raja Perancis berusaha menyingkirkan tuan-tuan feodal dan memusatkan pemerintahannya. Langkah itu membuat kekuasaan raja menjadi absolut, yang mengalami puncaknya pada masa Louis XIV (1643-1715). Raja Louis XIV melaksanakan pemerintahan dengan sewenang-wenang, bahkan tanpa undang-undang, hukum, parlemen, dan tanpa anggaran belanja yang pasti. Ia juga memiliki semboyan "le'etat cest moi" atau "negara adalah saya". Dengan demikian, hukum tertinggi adalah hukum raja. Untuk mempertahankan keabsolutan raja, Louis XIV menggunakan Penjara Bastille untuk siapa saja yang berani menentang raja. Orang-orang yang dianggap berbahaya dan tidak disenangi raja akan ditahan dengan sebab kurang jelas.

Dalam bidang politik, golongan bangsawan memiliki peranan yang sangat penting. Ketidakadilan dalam bidang politik pun terjadi, utamanya ketika terjadi pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan, bukan keahlian. Hal itu menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan muncul praktik korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperbolehkannya masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.